BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

PERUBAHAN RENJA 2026

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221

Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

disnakertmg@gmail.com

dinperinaker.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 21 Agustus 2026

Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur	Petugas Verifikator,
WORO PRATIWI SETYORINI, S.P., M.Eng	ROSITA PUTRI DIANI, S.E
NIP. 197705312005012011	NIP. 19940501 201903 2 006

Mengetahui,
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DR. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, kemudahan dan kesehatan yang telah diberikan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan baik.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Renja yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memperhatikan perkembangan kondisi, dinamika permasalahan, serta perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Perubahan Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target dan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 juga diarahkan untuk menyelaraskan perencanaan perangkat daerah dengan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan dapat berjalan secara lebih efektif, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 28 Agustus 2026

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II. 6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 6
BAB III 15
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 15
3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 15
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 21
BAB IV 34
PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....6

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II 2026…….. 7

Tabel 2.3 Capaian Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja…….....9

Tabel 3.1 Rencana Perubahan Renja Tahun 2026…….....15

Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, maka Perangkat Daerah harus segera menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:

a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2026 dengan pagu APBD tahun 2026.
b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana APBD;
c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
d. Adanya penghapusan sub kegiatan;

e. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 melalui tahapan-tahapan :

1) Persiapan penyusunan;
2) Penyusunan rancangan awal;
3) Penyusunan rancangan;
4) Perumusan rancangan akhir.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daeah Tahun 2026;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2026, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja Program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
   a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
   b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
   c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 merupakan tahun kedua penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja IKUPD dan Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) dan Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tingkat Capai an RPJMD s.d. Tahun 2026 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2026	Realisasi s.d TW II 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)							
	Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78.42-78.80	77,77	99,17	Sangat Tinggi
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,44	25,34	92,35	Sangat Tinggi
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	86,72	86,71	99,99	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	73	72,55	99,38	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	60,32	82	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	%	0,4	0,39	97,05	Sangat Tinggi
Indikator Kinerja Program							
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1	91,67	100	Sangat Tinggi
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	25,41	51	Rendah
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	82	58,82	71,74	Sedang

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tingkat Capai an RPJMD s.d. Tahun 2026 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2026	Realisasi s.d TW II 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	37	76,94	100	Sangat Tinggi
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	32	37,88	100	Sangat Tinggi
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	37	80,11	100	Sangat Tinggi
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94	100	100	Sangat Tinggi
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	69,59	69,20	99,44	Sangat Tinggi
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	42,52	72,73	100	Sangat Tinggi
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75	73,48	97,98	Sangat Tinggi
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47	76,52	100	Sangat Tinggi
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	48,27	78,23	100	Sangat Tinggi
6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	0,6	0,28	46,92	Sangat Rendah
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	2	1,80	90,15	Sangat Tinggi

Sumber : IKPD Bappeda Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.2, hasil evaluasi kinerja IKUPD dan indikator program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sudah baik. Seluruh indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) yang berjumlah 6 indikator menunjukkan capaian kinerja pada kategori Sangat Tinggi, dengan tingkat capaian berkisar antara 92,35% sampai dengan 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran strategis perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, tata kelola pelayanan publik, perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan sektor industri, telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada indikator program, sebagian besar indikator juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari 15 indikator program yang dievaluasi, 12 indikator memperoleh peringkat Sangat Tinggi, antara lain pada Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, serta Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Beberapa indikator bahkan telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Namun, masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerja masih belum mencapai target, yaitu Indikator persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi memperoleh capaian 51% dengan peringkat Rendah, sedangkan indikator persentase lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang dibina mencapai 71,74% dengan peringkat Sedang. Selain itu, indikator persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri memperoleh capaian 46,92% dan berada pada peringkat Sangat Rendah. Rendahnya capaian pada beberapa indikator tersebut antara lain disebabkan oleh sebagian kegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada Semester II, sehingga sampai dengan Triwulan II target belum seluruhnya dapat direalisasikan. Selain itu, masih berlangsung proses persiapan administrasi dan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga realisasi pada beberapa indikator masih relatif rendah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, dengan sebagian besar indikator berada pada peringkat Sangat Tinggi. Terhadap indikator yang capaiannya masih rendah atau sedang, akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan pada Semester II dapat lebih optimal dan mendukung tercapainya target kinerja Tahun 2026.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan

Capaian kinerja Kegiatan/Subkegian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**7.697.012.320**	**7.399.834.239**	**3.481.846.493**				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	-		
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.810.830.818	5.910.823.412	3.076.867.686	12 bulan	6	**50,00**	SANGAT RENDAH
c	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000		12 bulan	-	**-**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.639.000	20.639.000	8.027.000	12 bulan	6	**50,00**	SANGAT RENDAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.491.450	17.491.450	3.863.600	12 bulan	6	**50,00**	SANGAT RENDAH
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.232.502	11.732.502	4.904.000	12 bulan	6	**50,00**	SANGAT RENDAH
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	34.666.000	34.666.000	10.362.000	12 bulan	6	**50,00**	SANGAT RENDAH
d	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	465.000	12 bulan	3	**25,00**	SANGAT RENDAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000	82.954.325	29.474.619	12 bulan	6	**50,00**	SANGAT RENDAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.018.019	457.018.019	243.369.260	12 bulan	6	**50,00**	SANGAT RENDAH

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
e	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	83.884.531	72.884.531	27.999.328	17 unit	7	**41,18**	SANGAT RENDAH
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	2.835.000	26 unit	8	**30,77**	SANGAT RENDAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	40.000.000	0	1 unit	-	**-**	SANGAT RENDAH
2	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**							
a	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**							
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000	300.000.000	2.582.000	96 orang	77	**80,21**	TINGGI
b	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**							
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.000.000	5.500.000	200.000	20 Lembaga	20	**100**	SANGAT TINGGI
3	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**							
a	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**							
	Pelayanan Antar Kerja	9.000.000	4.500.000	250.000	200 orang	851	**100**	SANGAT TINGGI
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.000.000	4.500.000	1.969.000	450 orang	419	**93,11**	SANGAT TINGGI
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	22.000.000	11.000.000	0	3 orang	-	**-**	SANGAT RENDAH
	Perluasan Kesempatan Kerja	340.000.000	340.000.000	47.574.500	60 orang	60	**100**	SANGAT TINGGI
b	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**							
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.250.000	10.125.000		16 orang	-	**-**	SANGAT RENDAH

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**							
a	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**							9
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	60.000.000	21.103.500	8 Perkara	2	**25,00**	SANGAT RENDAH
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**340.000.000**	**895.000.000**	**13.220.600**				
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	25.000.000	2.265.700	1 dokumen	0,10	**10,00**	SANGAT RENDAH
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	250.000.000	850.000.000	7.359.000	1 dokumen	0,25	**25,00**	SANGAT RENDAH
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	15.000.000	7.500.000	1.005.000	1 dokumen	0,10	**10,00**	SANGAT RENDAH
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**							
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000	12.500.000	2.590.900	1 dokumen	0,20	**20,00**	SANGAT RENDAH
JUMLAH		**8.037.012.320**	**8.294.834.239**	**3.495.067.093**				

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026, diketahui bahwa:

a. Terdapat kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum memenuhi target kinerja karena pelaksanaannya masih berlangsung sesuai tahapan. Rendahnya capaian disebabkan masih adanya proses persiapan administrasi, atau penjadwalan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III, sehingga sebagian besar sub kegiatan memperoleh skala nilai peringkat kinerja Sangat Rendah.
b. Terdapat sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu Pelayanan Antar Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Ketiga sub kegiatan tersebut telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sehingga memperoleh skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Selain itu, terdapat sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja yang telah mencapai 93,11% dan memperoleh peringkat Sangat Tinggi.
c. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat sub kegiatan yang realisasinya telah melampaui target kinerja yang direncanakan, yaitu Pelayanan Antar Kerja pada Program Penempatan Tenaga Kerja. Target jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL sebanyak 200 orang, sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai 851 orang. Dengan demikian, capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

a. Sebagian sub kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan sesuai jadwal dan tahapan kegiatan, sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan II belum mencapai target yang ditetapkan.
b. Masih berlangsungnya proses persiapan dan administrasi pelaksanaan kegiatan, termasuk penyusunan dokumen, koordinasi, penetapan sasaran, serta proses pendukung lainnya, sehingga beberapa sub kegiatan belum dapat direalisasikan secara optimal.
c. Beberapa sub kegiatan memerlukan proses sosialisasi, seleksi, verifikasi, maupun penyesuaian dengan kebutuhan dan sasaran kegiatan, sehingga realisasi kinerja pada Triwulan II masih bervariasi. Di sisi lain, terdapat sub kegiatan yang telah mencapai target, bahkan Pelayanan Antar Kerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja :

a. Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih belum optimal, karena sebagian sub kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan beberapa capaian masih berada di bawah target yang ditetapkan.aa
b. Target kinerja program dalam Renstra masih dapat dicapai melalui percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, terutama terhadap sub kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah, disertai dengan penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi.
c. Terdapat sub kegiatan yang telah mencapai bahkan melampaui target, seperti Pelayanan Antar Kerja dengan realisasi 851 orang dari target 200 orang. Hal ini menjadi capaian positif yang mendukung pencapaian target program secara keseluruhan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:

a. Melakukan percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.
b. Meningkatkan koordinasi antarbidang, perangkat daerah terkait, serta instansi pendukung guna mempercepat penyelesaian proses administrasi, penetapan sasaran, dan pelaksanaan kegiatan.
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai dasar dalam menentukan langkah percepatan dan memastikan target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan Triwulan II. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja Tahun 2026

No	Bidang/Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-3)*	*7 (5-4)*	*8*
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**7.697.012.320**	**7.436.234.239**	**7.488.526.559**			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.565.762.320**	**6.700.609.239**	**6.752.901.559**			
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.810.830.818**	**5.947.223.412**	**5.950.223.412**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.810.830.818	5.947.223.412	5.950.223.412	139.392.594	3.000.000	
c	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92.028.952**	**89.528.952**	**88.979.352**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.639.000	20.639.000	20.639.000			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.491.450	17.491.450	16.941.850	(549.600)	(549.600)	Digeser ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.549.600 dengan alasan efisiensi kebutuhan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.232.502	11.732.502	11.732.502	(2.500.000)	-	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	34.666.000	34.666.000	34.666.000	-	-	

No	Bidang/Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-3)*	*7 (5-4)*	*8*
d	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**12.000.000**			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Pergeseran dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 11.450.400 dan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 549.600 dengan alasan kurangnya kebutuhan anggaran (untuk pengadaan CCTV Kantor)
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**544.018.019**	**540.972.344**	**578.814.264**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	1.000.000	(1.000.000)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000	82.954.325	71.503.925	(13.496.075)	(11.450.400)	Digeser ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.11.450.400 dengan alasan efisiensi kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.018.019	457.018.019	506.310.339	49.292.320	49.292.320	Usulan penambahan pagu anggaran untuk kekurangan gaji PPPK Paruh Waktu
f	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**118.884.531**	**122.884.531**	**122.884.531**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	83.884.531	72.884.531	72.884.531	(11.000.000)	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	40.000.000	40.000.000	15.000.000	-	

No	Bidang/Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-3)*	*7 (5-4)*	*8*
2	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**611.000.000**	**305.500.000**	**305.500.000**			
a	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**600.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000	300.000.000	300.000.000	(300.000.000)	-	
b	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**11.000.000**	**5.500.000**	**5.500.000**			
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.000.000	5.500.000	5.500.000	(5.500.000)	-	
3	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**400.250.000**	**370.125.000**	**370.125.000**			
a	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**380.000.000**	**360.000.000**	**360.000.000**			
	Pelayanan Antar Kerja	9.000.000	4.500.000	4.500.000	(4.500.000)	-	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.000.000	4.500.000	4.500.000	(4.500.000)	-	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	22.000.000	11.000.000	11.000.000	(11.000.000)	-	
	Perluasan Kesempatan Kerja	340.000.000	340.000.000	340.000.000			
b	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**20.250.000**	**10.125.000**	**10.125.000**			
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.250.000	10.125.000	10.125.000	(10.125.000)	-	

No	Bidang/Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-3)*	*7 (5-4)*	*8*
4	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**120.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**			
a	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**120.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**			
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	60.000.000	60.000.000	(60.000.000)	-	
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**340.000.000**	**895.000.000**	**915.892.000**			
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**315.000.000**	**882.500.000**	**903.392.000**			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**315.000.000**	**882.500.000**	**903.392.000**			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	25.000.000	45.892.000	(4.108.000)	20.892.000	Usulan penambahan pagu anggaran untuk kegiatan Dekranasda
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	250.000.000	850.000.000	850.000.000	600.000.000	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	15.000.000	7.500.000	7.500.000	(7.500.000)	-	

No	Bidang/Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5-3)*	*7 (5-4)*	*8*
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**25.000.000**	**12.500.000**	**12.500.000**			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**25.000.000**	**12.500.000**	**12.500.000**			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000	12.500.000	12.500.000	(12.500.000)		
		8.037.012.320	**8.331.234.239**	**8.404.418.559**	**367.406.239**	**73.184.320**	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel di atas, berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2026, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Awal Renja : Rp. 8.037.012.320
2. Pagu Awal APBD (Perubahan Perbup II) : Rp. 8.331.234.239
3. Pagu Perubahan : Rp. 8.404.418.559
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp 367.406.239
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal APBD : Rp 73.184.320

Selisih antara Pagu Awal Renja dengan Pagu Perubahan disebabkan oleh penyesuaian pagu program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan hasil pembahasan serta penetapan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan disebabkan oleh penyesuaian dan pergeseran alokasi anggaran antar program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan serta hasil pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**7.697.012.320**	**7.436.234.239**				**7.488.526.559**	**7.488.526.559**				
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**7.697.012.320**	**7.436.234.239**				**7.488.526.559**	**7.488.526.559**				
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**6.565.762.320**	**6.700.609.239**				**6.752.901.559**	**6.752.901.559**				
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**5.810.830.818**	**5.947.223.412**				**5.950.223.412**	**5.950.223.412**				
2	07	01	2.02	O1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinaker	41	Orang/ bulan	5.810.830.818	5.947.223.412	Dinperinaker	45	Orang/ bulan	5.950.223.412	5.950.223.412	139.392.594	3.000.000	DAU	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**92.028.952**	**89.528.952**				**88.979.352**	**88.979.352**				
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	12	Paket	5.000.000	5.000.000	Dinperinaker	12	Paket	5.000.000	5.000.000	0	0	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	12	Paket	20.639.000	20.639.000	Dinperinaker	12	Paket	20.639.000	20.639.000	0	0	DAU	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinperinaker	12	Paket	17.491.450	17.491.450	Dinperinaker	12	Paket	16.941.850	16.941.850	(549.600)	(549.600)	DAU	Digeser ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.549.600 dengan alasan efisiensi kebutuhan
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinaker	12	Laporan	14.232.502	11.732.502	Dinperinaker	12	Laporan	11.732.502	11.732.502	(2.500.000)	0	DAU	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinaker	12	Laporan	34.666.000	34.666.000	Dinperinaker	12	Laporan	34.666.000	34.666.000	0	0	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**12.000.000**	**12.000.000**				
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinperinaker	0	Unit	0	0	Dinperinaker	6	Unit	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	DAU	Pergeseran dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 11.450.400 dan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 549.600 dengan alasan kurangnya kebutuhan anggaran (untuk pengadaan CCTV Kantor)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**544.018.019**	**540.972.344**				**578.814.264**	**578.814.264**				
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperinaker	12	Laporan	2.000.000	1.000.000	Dinperinaker	12	Laporan	1.000.000	1.000.000	(1.000.000)	0	DAU	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinperinaker	12	Laporan	85.000.000	82.954.325	Dinperinaker	12	Laporan	71.503.925	71.503.925	(13.496.075)	(11.450.400)	DAU	Digeser ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.11.450.400 dengan alasan efisiensi kebutuhan
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	12	Laporan	457.018.019	457.018.019	Dinperinaker	12	Laporan	506.310.339	506.310.339	49.292.320	49.292.320	DAU	Usulan penambahan pagu anggaran untuk kekurangan gaji PPPK Paruh Waktu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**118.884.531**	**122.884.531**				**122.884.531**	**122.884.531**				
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinperinaker	17	Unit	83.884.531	72.884.531	Dinperinaker	17	Unit	72.884.531	72.884.531	(11.000.000)	0	DAU	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinperinaker	26	Unit	10.000.000	10.000.000	Dinperinaker	26	Unit	10.000.000	10.000.000	0	0	DAU	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinperinaker	1	Unit	25.000.000	40.000.000	Dinperinaker	1	Unit	40.000.000	40.000.000	15.000.000	0	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**611.000.000**	**305.500.000**				**305.500.000**	**305.500.000**				
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**					**600.000.000**	**300.000.000**				**300.000.000**	**300.000.000**				
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	Dinperinaker	96	Orang	600.000.000	300.000.000	Dinperinaker	96	Orang	300.000.000	300.000.000	- 300.000.000	0	DBHCHT	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**					**11.000.000**	**5.500.000**				**5.500.000**	**5.500.000**				
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20	Lembaga	11.000.000	5.500.000		20	Lembaga	5.500.000	5.500.000	(5.500.000)	0	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					**400.250.000**	**370.125.000**				**370.125.000**	**370.125.000**	**(30.125.000)**			
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**					**380.000.000**	**360.000.000**				**360.000.000**	**360.000.000**	**(20.000.000)**			
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	200	Orang	9.000.000	4.500.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	200	Orang	4.500.000	4.500.000	(4.500.000)	0	DAU	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	450	Orang	9.000.000	4.500.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	450	Orang	4.500.000	4.500.000	(4.500.000)	0	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	3	Orang	22.000.000	11.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	3	Orang	11.000.000	11.000.000	(11.000.000)	0	DAU	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	60	Orang	340.000.000	340.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	60	Orang	340.000.000	340.000.000	0	0	DAU	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota**					**20.250.000**	**10.125.000**				**10.125.000**	**10.125.000**				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
2	07	04	2.04	01	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	16	Orang	20.250.000	10.125.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	16	Orang	10.125.000	10.125.000	(10.125.000)	0	DAU	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					**120.000.000**	**60.000.000**				**60.000.000**	**60.000.000**				
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**					**120.000.000**	**60.000.000**				**60.000.000**	**60.000.000**				
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8	Perkara	120.000.000	60.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8	Perkara	60.000.000	60.000.000	(60.000.000)	0	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**340.000.000**	**895.000.000**				**915.892.000**	**915.892.000**				
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**340.000.000**	**895.000.000**				**915.892.000**	**915.892.000**				
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					**315.000.000**	**882.500.000**				**903.392.000**	**903.392.000**				
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**					**315.000.000**	**882.500.000**				**903.392.000**	**903.392.000**				
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	50.000.000	25.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	45.892.000	45.892.000	(4.108.000)	20.892.000	DAU	Usulan penambahan pagu anggaran untuk kegiatan Dekranasda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	Dokumen	250.000.000	850.000.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	850.000.000	850.000.000	600.000.000	0	DBHCHT	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	Dokumen	15.000.000	7.500.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	7.500.000	7.500.000	(7.500.000)	0	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	15	16
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					**25.000.000**	**12.500.000**				**12.500.000**	**12.500.000**				
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**					**25.000.000**	**12.500.000**				**12.500.000**	**12.500.000**				
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	25.000.000	12.500.000	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	12.500.000	12.500.000	(12.500.000)	0	DAU	
TOTAL										**8.037.012.320**	**8.331.234.239**				**8.404.418.559**	**8.404.418.559**	**367.406.239**	**73.184.320**		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten *Temanggung, 2026*

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2026, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp. 8.404.418.559. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Perubahan Renja Tahun 2026 juga senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2026 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 28 Agustus 2026

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

CHECKLIST VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

URAIAN		HASIL VERIFIKASI					KETERANGAN
		ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	CATATAN	
Halaman Judul: "PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN 2026"		V		V			
Tanggal Pengesahan : 28 Agustus 2026		V		V			
BAB I	**PENDAHULUAN**						
1.1	Latar belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	V		V			*Pastikan dasar perubahannya sudah menggunakan PERBUP No 45 TAHUN 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta memberikan alasan perubahan*
1.2	Landasan Hukum	V		V			*Pastikan sudah menggunakan landasan hukum terbaru*
1.3	Maksud dan Tujuan	V		V			
1.4	Sistematika Penulisan	V		V			*Pastikan sudah terdiri dari 4 bab sesuai template*
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA [PERANGKAT DAERAH] SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026**						
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja [PERANGKAT DAERAH] Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	V		V			*Terdiri dari Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, Evaluasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan*

URAIAN		HASIL VERIFIKASI					KETERANGAN
		ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK	CATATAN	
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN						
3.1	Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	V		V			*Pagu awal menggunakan Perbup II 2026, menggunakan pagu rincian di SIPD terakhir*
3.2	Matriks Rencana Perubahan Renja [Perangkat Daerah] Tahun 2026	V		V			*Pagu sebelum perubahan menggunakan Perbup II 2026, menggunakan pagu rincian di SIPD terakhir*
BAB IV	PENUTUP	V		V			

Temanggung, 21 Agustus 2026

Koordinator Bidang ESDAI/~~PPMP~~

WORO PRATIWI SETYORINI, S.P., M.Eng
NIP. 197705312005012011

Verifikator

Rosita Putri Diani, SE
NIP. 199405012019032006